

Implementasi Kebijakan Pendampingan Ekonomi Pascabencana: Studi Kasus Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau Tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang

Ali Rakhman ^{1*}, Panji Hendrarso ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ alienote82@gmail.com; ² panjihendrarso@stiami.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Agustus 22, 2025

Revised : Agustus 28, 2025

Accepted : September 2, 2025

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan;
Pendampingan Ekonomi;
Rehabilitasi;
Rekonstruksi;
Erupsi Anak Krakatau;

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang. Fokus kajian terletak pada pelaksanaan program pendampingan ekonomi serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi program bagi masyarakat terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan terhadap BNPB, BPBD, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta kelompok penerima manfaat. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama mencakup lemahnya efektivitas komunikasi antar- stakeholder, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap pelaksana yang beragam, serta struktur birokrasi yang terfragmentasi. Sebagian besar kelompok binaan mengalami stagnasi pasca intervensi, menandakan lemahnya keberlanjutan program. Faktor penghambat utama adalah ketiadaan pendamping lokal berinsentif, kompleksitas perubahan mata pencaharian pascarelokasi, dan lemahnya sinergi lintas sektor. Namun, terdapat pula praktik baik di sejumlah kelompok yang berhasil berkelanjutan berkat kombinasi dukungan institusional dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komitmen lintas sektor, perbaikan mekanisme koordinasi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta pengembangan strategi insentif berkelanjutan guna memastikan efektivitas kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana.



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan geologisnya yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Posisi Indonesia di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) menjadikannya memiliki 127 gunung api aktif, jumlah terbanyak di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan ancaman bencana gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami hampir selalu mengintai. Dalam dua dekade terakhir, tren bencana di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Data BNPB (2024) mencatat rata-rata lebih dari 3.000 kejadian bencana setiap tahunnya, dengan dampak besar terhadap korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya roda perekonomian. Bencana bukan hanya memunculkan kerugian fisik, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, memperburuk kemiskinan, serta memperlebar ketimpangan.

Salah satu bencana yang cukup parah adalah tsunami yang terjadi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018. Tsunami ini menghantam pesisir Banten dan Lampung, mengakibatkan kerusakan masif di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Kabupaten Pandeglang tercatat sebagai wilayah dengan kerugian terbesar. BNPB (2019) mencatat kerugian mencapai Rp260 miliar, dengan 58,8% kerugian berasal dari sektor ekonomi produktif seperti perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Bencana tersebut tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

Banyak nelayan kehilangan kapal, petani kehilangan lahan, dan pelaku UMKM kehilangan akses pasar. Kondisi ini memicu permasalahan lanjutan berupa pengangguran, kemiskinan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat terdampak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi meluncurkan program Pendampingan Ekonomi (PE) pascabencana di empat kabupaten terdampak, termasuk Pandeglang. Program ini melibatkan perguruan tinggi (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), BPBD, dan OPD teknis. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat memulihkan kembali penghidupannya. Namun, evaluasi tahun 2023 menunjukkan bahwa 50% kelompok binaan sudah tidak aktif, menandakan lemahnya keberlanjutan program. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan PE telah berjalan sesuai tujuan, faktor apa saja yang mendukung atau menghambat, serta bagaimana strategi perbaikan dapat dilakukan agar program serupa lebih efektif di masa mendatang.

a. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi empat masalah utama implementasi kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana tsunami 2018 di Kabupaten Pandeglang:

1. Tidak aktifnya kelompok binaan pasca intervensi, sebagian besar stagnan dan gagal berkelanjutan.
2. Lokasi kelompok binaan yang jauh dari pusat kota, menyulitkan akses pendampingan dan komunikasi efektif.
3. Rendahnya infrastruktur komunikasi di lokasi binaan, membatasi arus informasi antara pelaksana dan masyarakat.
4. Minimnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam mendukung keberlanjutan kebijakan pendampingan ekonomi.

b. Pembatasan Masalah

Lingkup penelitian dibatasi pada implementasi kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang periode tahun anggaran 2020-2021. Fokus pada satu daerah dan satu jenis program dibuat untuk menjaga akurasi dan kedalaman analisis, sekaligus memastikan hasil kajian bersifat holistik dan relevan dengan konteks lokal menggunakan analisis empat variabel implementasi menurut Edwards III.

c. Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana tersebut?

KAJIAN LITERATUR

Teori Kebijakan Publik

Keberhasilan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan publik, bukan semata oleh sumber daya, letak, atau politiknya (Nugroho, 2018). Kebijakan publik menurut Anderson adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh aktor untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Dye (1995) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Proses kebijakan publik meliputi agenda setting, formulation, decision making, implementation, hingga evaluation (Howlett & Ramesh, Subarsono, 2009).

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi menjadi tahapan kritis dalam kebijakan publik yang menghubungkan tujuan dengan outcome. Syukur (2005) menggarisbawahi tiga unsur: adanya program, kelompok target, dan

pelaksana. Sedangkan Edwards III (1980) dalam bukunya *Implementing Public Policy* menyatakan bahwa efektivitas implementasi bergantung pada interaksi empat variabel kunci:

1. Transmisi kebijakan harus memenuhi tiga indikator: kejelasan, konsistensi, dan akurasi. Distorsi informasi terjadi jika saluran komunikasi tidak terstruktur.
2. Meliputi kualitas SDM, kecukupan anggaran, fasilitas pendukung, dan kewenangan institusional. Menurut Edwards, "anggaran yang tidak memadai adalah prediktor utama kegagalan implementasi".
3. Diukur melalui SOP dan derajat fragmentasi. Birokrasi yang terfragmentasi menghambat koordinasi vertikal-horizantal.
4. Sikap pelaksana dipengaruhi oleh insentif, pemahaman kebijakan, dan keselarasan nilai.

Teori Edwards III (1980) relevan untuk menganalisis program PE karena kompleksitas multiaktor (BNPB, pemda, universitas, masyarakat). Sementara Grindle (1980) dan Van Meter & Van Horn mengingatkan, kegagalan kebijakan bisa terjadi akibat non-implementasi atau unsuccessful implementation.

Manajemen Penanggulangan Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 membagi penanggulangan bencana ke dalam tiga fase: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Fase pascabencana mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan mengembalikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pada pasal 58-59 mengatur secara komprehensif tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi mencakup 11 aspek pemulihan, meliputi: perbaikan lingkungan terdampak; restorasi sarana dan prasarana publik; bantuan rehabilitasi rumah masyarakat; pemulihan kesehatan mental; layanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan tatanan sosialekonomi-budaya; pengembalian stabilitas keamanan; normalisasi fungsi pemerintahan; serta revitalisasi fungsi layanan publik. Sementara itu, rekonstruksi difokuskan pada pembangunan berkelanjutan melalui 8 strategi utama: pembangunan kembali infrastruktur berstandar bencana, pembangunan kembali fasilitas social masyarakat, penguatan nilai sosiokultural, penerapan teknologi tahan bencana, kolaborasi multipihak (pemerintah-swasta-masyarakat), peningkatan kondisi social- ekonomibudaya, optimalisasi fungsi layanan publik, dan penguatan pelayanan utama dalam masyarakat. Terdapat 5 sektor strategis yang menjadi sasaran strategis kebijakan rekonstruksi pasca bencana yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Sektor-sektor Strategis Sasaran Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana

No	Sektor Strategis	Sub Sektor
1	Sektor Permukiman	Sub sektor perumahan dan prasarana lingkungan perumahan
2	Sektor infrastruktur	Sub sektor transportasi, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, irigasi, dan sumber daya air
3	Sektor sosial	Sub sektor pendidikan, kesehatan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, dan lembaga sosial
4	Sektor ekonomi produktif	Sub sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, kelautan dan perikanan, industri/ usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan pariwisata
5	Lintas sektor	Subsektor lingkungan hidup, pemerintahan, sektor keuangan dan perbankan, ketertiban dan keamanan

Sumber: BNPB (2019)

Prinsip build back better and safer mutlak harus dapat diwujudkan pada lima sector pemulihan Pasca bencana meliputi:

- a) Sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- b) Sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos,

- telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
- c) Sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
 - d) Sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 - e) Lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008, pemulihan ekonomi pascabencana bertujuan menghidupkan kembali kegiatan/kelembagaan produk, distribusi, dan konsumsi di masyarakat terdampak, dengan indikator pencapaian terukurnya aktivitas ekonomi, partisipasi masyarakat, volume produksi, serta transaksi ekonomi.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III, yang menelaah keempat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai determinan utama proses dan outcome kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana. Dengan kerangka ini, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi, membandingkan teori dengan temuan empiris di Kabupaten Pandeglang, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam atas fenomena implementasi kebijakan di konteks lokal, khususnya pada dinamika di Kabupaten Pandeglang pasca erupsi Gunung Anak Krakatau tahun 2018. Studi kasus memungkinkan peneliti mendalami interaksi antar variabel penentu, menangkap kompleksitas masalah, dan mengungkap makna serta persepsi pelaksana dan penerima manfaat. Studi kasus juga dinilai paling tepat karena mampu mempertahankan karakteristik holistik dan kontekstual suatu peristiwa kehidupan nyata (Yin, 2014; Sprenkie, 1995).

Sumber Data

Data berasal dari dua sumber:

(1) Data primer berupa wawancara mendalam dengan pejabat BNPB, BPBD, tim pelaksana lapangan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta anggota kelompok penerima manfaat. (2) Data sekunder berupa dokumen R3P, laporan BNPB, data DIBI, serta literatur terkait.

Teknik Pengumpulan Data

- (1) Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi

Validitas Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber/metode, perpanjangan pengamatan, dan diskusi teman sejawat, dengan mengadopsi kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln & Guba).

Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengikuti model Creswell (2018):

- (1) Organisasi dan preparasi data transkrip. (2) *Coding* tematik berdasarkan variabel Edwards III. (3)

Interpretasi pola tematik dan hubungan antarvariabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi ekonomi pertanian dan pariwisata, namun tingkat kemiskinan tertinggi di Banten (9.18%). Daerah ini juga termasuk rawan bencana—banjir, longsor, gempa, letusan gunung api, dan tsunami.

Implementasi Kebijakan Pendampingan Ekonomi Pascabencana

1. Komunikasi

Seluruh informan menilai bahwa komunikasi kebijakan dilakukan secara efektif melalui pertemuan tatap muka, membangun dialog interaktif yang memungkinkan klarifikasi langsung dan penyesuaian bahasa sesuai kondisi lokal. Informasi terkait tujuan, manfaat, dan prosedur program pendampingan tersampaikan secara jelas dan dapat dipahami baik oleh pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat. Namun, komunikasi sempat terhambat oleh kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi daerah yang sulit dijangkau.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Dari aspek sumber daya manusia, tim pelaksana dari universitas dan BNPB dinilai kompeten, namun intensitas kehadiran mereka di lapangan perlu ditingkatkan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi kelompok penerima manfaat dalam pelatihan akibat prioritas ekonomi jangka pendek (mencari nafkah harian).

Anggaran program dinilai cukup memadai untuk dua kelompok binaan, mencakup biaya pendampingan, pelatihan, alat produksi, dan insentif pelaksana. Namun, cakupan anggaran terbatas, belum mampu menjangkau seluruh penyintas bencana di kawasan relokasi. Fasilitas yang disediakan sudah cukup dalam hal pelatihan dan bantuan alat produksi, namun kelompok binaan masih kesulitan mendapatkan workshop atau tempat produksi yang representatif. Selama ini mereka menggunakan teras rumah warga sebagai lokasi produksi, membatasi waktu operasional dan kenyamanan lingkungan. Kewenangan implementasi program terbagi antara BNPB sebagai pengendali anggaran dan kebijakan, universitas yang menangani teknis operasional, serta BPBD sebagai fasilitator lokal. Namun, BPBD dan OPD terkait masih belum maksimal dalam memberikan dukungan langsung karena keterbatasan anggaran dan mandat.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi formal telah dibangun melalui SOP dan Kerangka Acuan Kerja, dengan pembagian peran antara BNPB, universitas, dan BPBD. Namun, koordinasi lintas sektor di tingkat daerah terfragmentasi dan belum terintegrasi optimal. Tidak adanya mekanisme keberlanjutan terstruktur menyebabkan kelompok binaan ditinggalkan tanpa pendampingan pasca program. BPBD dan OPD hanya berperan sebagai penghubung pasif, sementara responsivitas dalam mendampingi kelompok binaan lemah akibat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Masalah fragmentasi birokrasi, SOP yang kaku, dan lemahnya standar prosedur lintas sektor menghambat kolaborasi efektif antar instansi, baik dari pusat maupun daerah.

4. Disposisi

BNPB menunjukkan komitmen kuat mendukung program, mengalokasikan anggaran, sumber daya, dan insentif pelaksana. Tim pelaksana di universitas memiliki pemahaman yang jelas serta motivasi tinggi dalam menjalankan program, didorong oleh insentif yang memadai. Namun, di tingkat daerah, OPD terkait dan BPBD menunjukkan komitmen dan keterlibatan rendah akibat minimnya dukungan anggaran dan ketiadaan insentif bagi pelaksana local.

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan

1. Faktor pendukung keberhasilan di antaranya:

- a. Komunikasi efektif melalui tatap muka langsung, dengan narasi kebijakan yang mudah dipahami.
- b. Ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan di dua kelompok binaan.
- c. SOP dan struktur peran yang jelas antara BNPB, universitas, dan BPBD.
- d. Penggunaan kearifan lokal dan pendekatan berbasis masyarakat guna memperkuat penerimaan program.

2. Faktor penghambat atau kegagalan meliputi:

- a. Ketidakefektifan komunikasi pada lokasi terpencil dengan akses informasi terbatas.
- b. Distribusi sumber daya yang belum merata dan cakupan anggaran terbatas.
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat penerima manfaat, utamanya kelompok relokasi yang menghadapi kompleksitas perubahan mata pencaharian.
- d. Struktur birokrasi yang terfragmentasi dan minim sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
- e. Ketidadaan pendamping lokal yang mendapatkan insentif, serta lemahnya koordinasi antar OPD teknis.
- f. Tidak adanya mekanisme monitoring dan pendampingan lanjutan untuk keberlanjutan program.

Interaksi keempat faktor utama menurut model Edwards III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan baik pada tahapan awal, namun gagal menjamin keberlanjutan dan dampak jangka panjang akibat hambatan kelembagaan, sosial, serta ekonomi. Keberhasilan beberapa kelompok program justru didorong oleh partisipasi aktif dan dukungan institusional yang kuat, sedangkan kegagalan pada kelompok lain mengindikasikan perlunya perancangan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendampingan ekonomi pascabencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau 2018 di Kabupaten Pandeglang telah berjalan sesuai tahapan perencanaan, mulai dari sosialisasi, pembentukan kelompok, pelaksanaan pelatihan, hingga pendampingan teknis. Namun, efektivitas pencapaian hasil di lapangan masih belum optimal. Beberapa kelompok binaan berhasil mencapai kemandirian ekonomi, sedangkan lainnya mengalami stagnasi atau tidak aktif akibat interaksi kompleks antar pelaksana kebijakan, kendala birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan lokal yang belum terakomodasi secara tepat.

Keberhasilan program ditentukan oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, struktur birokrasi yang jelas, disposisi pelaksana yang kuat, serta adaptasi program terhadap kearifan lokal. Sementara kegagalan dipengaruhi oleh ketidakefektifan komunikasi di daerah terpencil, distribusi sumber daya belum merata, lemahnya dukungan dan insentif pendamping lokal, keterbatasan monitoring, dan fragmentasi birokrasi tanpa mekanisme keberlanjutan.

Saran

1. Program pendampingan ekonomi harus lebih responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok sasaran, mempertimbangkan potensi dan karakteristik masyarakat setempat.
2. Perlu disediakan pendamping lokal yang berkompeten dan mendapatkan insentif, bukan hanya sebagai pelaksana jangka pendek, tetapi juga penjamin keberlanjutan dampak program.
3. Kebijakan pendampingan ekonomi sebaiknya diintegrasikan secara formal dalam perencanaan pembangunan daerah sejak awal, supaya pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pendampingan lanjutan.

4. Motivasi dan kinerja pelaksana perlu diperkuat melalui insentif finansial maupun non-finansial serta sistem penghargaan berbasis *outcome*.
5. Struktur birokrasi pelaksana perlu disusun lebih terarah dan efektif, dilengkapi SOP yang jelas dan mengikat secara lintas sektor guna menjamin kesinambungan dukungan teknis dan kelembagaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- BNPB. (2008). Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Jakarta: BNPB.
- Dunn, W. N. (2009). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.
- Nugroho, R. (2018). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahman, A., Jeddawi, M., Mansur, & Kurniawati, L. (2023). Implementasi kebijakan penanganan gempa bumi Lombok 2018. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(2), 233–250.
- Setyowati, A. C., & Suryaningsih, M. S. (2018). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–59.
- Subarsono, A. (2009). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2007). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.